

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERUBAHAN STATUS DESA  
MENJADI KELURAHAN TERHADAP PRODUKTIVITAS USAHA  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT KELURAHAN JAMPANGKULON**

**Purwanto**

*Email : [purwanto060782@gmail.com](mailto:purwanto060782@gmail.com)*

STISIP Syamsul Ulum Sukabumi

***Abstract***

*This study aims to determine: (1) the implementation of the policy of changing the status of a village to a sub-district, (2) the productivity of the community's economic business, and (3) the influence of the implementation of the policy of changing the status of a village to a village on the productivity of the community's economic business in the Jampangkulon Village. The population of this research is all economic business actors in Jampangkulon Village, totaling 782 people, with a total sample of 89 people taken using the Proportionate Stratified Random Sampling technique. The results of the calculation of descriptive analysis show that the average score of the Variable Policy Implementation Changes in Village Status into Kelurahan is 3.47 or 69.40% of the ideal value and is included in the good category, while the Productivity of Community Economic Enterprises is 3.65 or 73.00 % of the ideal value and included in the good category. The results of statistical analysis obtained the price of  $r_{XY} = 0.428$  which is included in the criteria is quite strong. With a significance value (2-tailed)  $0.000 < 0.05$ , so it can be concluded that the Implementation of the Policy on Changing the Status of a Village to a Village has a positive and significant effect on the Productivity of Community Economic Enterprises. The coefficient of determination (KD) is 0.1832, which means 18.32% of the Community Economic Business Productivity variable (Y) can be explained by the Variable of Policy Implementation to Change Village Status to Kelurahan (X), and the rest is determined by other factors. While the linear regression equation model obtained is  $Y = 23.993 + 0.483X$ . Therefore, to increase the productivity of the community's economic business, it is recommended to increase the efficiency and effectiveness of the Policy Implementation to Change the Status of Villages to Villages.*

*Keywords: Policy implementation, economic productivity.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) implementasi kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan, (2) produktivitas usaha perekonomian masyarakat, dan (3) sejauhmana pengaruh implementasi kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap produktivitas usaha ekonomi masyarakat Kelurahan Jampangkulon. Populasi penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha ekonomi di Kelurahan Jampangkulon yang berjumlah 782 orang, dengan jumlah sampel sebanyak 89 orang yang diambil dengan teknik *Proportionate Stratified Random Sampling*. Hasil perhitungan analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata skor variabel Implementasi Kebijakan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebesar 3,47 atau 69,40% dari nilai idealnya dan termasuk dalam kategori baik, sedangkan Produktivitas Usaha Perekonomian Masyarakat sebesar 3,65 atau 73,00% dari nilai idealnya dan termasuk dalam kategori baik. Adapun hasil analisis statistik diperoleh harga  $r_{XY} = 0,428$  yang termasuk dalam kriteria cukup kuat. Dengan nilai signifikansi (2-tailed)  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produktivitas Usaha Perekonomian Masyarakat. Koefisien determinasi (KD) sebesar 0,1832 yang berarti 18,32% variabel Produktivitas Usaha Perekonomian Masyarakat (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Implementasi Kebijakan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (X), dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain. Sedangkan model persamaan regresi linear yang didapatkan adalah  $Y = 23,993 + 0,483X$ . Oleh karena itu, untuk meningkatkan Produktivitas Usaha Perekonomian Masyarakat disarankan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Implementasi Kebijakan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

*Kata Kunci: Implementasi kebijakan, produktivitas ekonomi.*

---

Submitted: 12-09-2022 | Accepted: 23-09-2022 | Published: 24-09-2022

---

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan regulasi pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten/Kota didasarkan kepada azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam kewenangan otonomi yang luas ini tercakup keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang meliputi kewenangan bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter data fiskal, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Disamping itu, Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut juga menempatkan desa sebagai sub sistem pemerintahan di daerah. Pemberian kewenangan pemerintahan yang

luas kepada desa membawa konsekuensi langsung berkurangnya kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Kabupaten/Kota terhadap desa dan penambahan tanggung jawab kepada desa. Dalam konteks ini, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan, koordinator dan penanggungjawab di bidang pemerintahan, sosial kemasyarakatan dan pembangunan di desanya, dituntut kemampuannya dalam menerapkan prinsip kepemimpinan yang berfokus pada efektifitas perilaku kepemimpinan yang mampu menggerakkan aparat desanya dalam fungsi pelayanan pada masyarakat.

Kedudukan Pemerintahan Desa dalam tatanan sistem Pemerintahan Indonesia merupakan organisasi pemerintahan terendah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kedudukan tersebut menempatkan desa sebagai sentral dari program-program kegiatan pemerintah terutama yang datang dari atas. Apalagi saat ini program-program pembangunan diprioritaskan dan diarahkan ke daerah pedesaan. Oleh karena itu, perangkat desa dituntut untuk dapat berfungsi secara optimal dalam mengemban tugas yang diserahkan kepadanya.

Secara umum, misi utama yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa meliputi tiga hal pokok yaitu pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Keberhasilan dari ketiga hal tersebut sangat bergantung pada kualitas kinerja perangkat desanya. Perangkat desa sebagai pelaksana utama penyelenggaraan pemerintahan harus mampu menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya. Pelayanan masyarakat merupakan implementasi dari pada hak dan kewajiban antara perangkat desa dengan masyarakat yang harus diwujudkan secara efektif. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik dari perangkat desa, sedangkan perangkat desa berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan pembangunan dalam konteks pemerintah daerah dan kelurahan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan, Pemekaran dan Penghapusan Kelurahan merupakan sebuah keinginan pemerintah dalam rangka merespon dan mengakomodasi

perkembangan dan kompleksitas kepentingan pelayanan masyarakat khususnya pada tingkat kelurahan, termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Posisi dan letak Desa Jampangkulon yang strategis, mengundang banyak masyarakat pendatang. Hal ini menyebabkan semakin heterogenya masyarakat desa. Dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai serta potensi ekonomi yang ada dapat memberikan sebuah jaminan dan dukungan bagi pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan perubahan status desa menjadi Kelurahan Jampangkulon.

Perubahan status desa menjadi Kelurahan Jampangkulon merupakan kebijakan atau upaya pemerintah dalam rangka membentuk kelurahan baru dengan tujuan tercapainya efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan menuntut adanya perubahan perangkat, perangkat desa menjadi perangkat kelurahan. Hal ini dikarenakan kedua sistem pemerintahan ini, walaupun setara tetapi komponen-komponen yang ada dalam birokrasinya berbeda.

Esensi sebuah pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakatnya. Pemerintah diadakan untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggotanya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Dengan begitu, pemerintah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) sudah selayaknya memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan berkualitas selain bermanfaat bagi masyarakat juga berdampak terhadap citra aparat pemerintah itu sendiri.

Konteks perubahan dalam kajian ini merupakan bentuk dan peningkatan status yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat perkotaan. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan perubahan status desa menjadi kelurahan. Penetapan status desa menjadi kelurahan, kewenangan desa sebagai suatu

kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi wilayah kerja kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Camat. Pada akhirnya perubahan status desa menjadi Kelurahan Jampangkulon diharapkan berdampak pada peningkatan upaya pembangunan baik pembangunan fisik maupun ekonomi masyarakat.

Namun demikian, penelitian awal yang dilakukan di Kelurahan Jampangkulon setelah berjalan selama 1 (satu) tahun belum berdampak secara nyata terhadap peningkatan perekonomian masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari indikasi berikut:

- 1) Kurangnya akses informasi pasar dan teknologi. Pelaku usaha atau bisnis mikro dan usaha kecil di Kelurahan Jampangkulon sering kali kurang mendapatkan akses pasar, yang meliputi keinginan, kebutuhan dan kesukaan konsumen yang kemudian biasanya berhubungan dengan aspek kualitas atau mutu produk yang dihasilkan dan dipengaruhi oleh teknologi yang dipergunakan.
- 2) Kurangnya akses permodalan. Pelaku Usaha Menengah Kecil (UMK) pada umumnya merasa kesulitan untuk mendapatkan kredit melalui badan resmi yang disebabkan persyaratan-persyaratan yang dinilai masyarakat sering kali terlalu berbelit dan sulit dipenuhi. Namun disatu pihak ada kelompok masyarakat yang mengatakan tidak memperlumahkan hal tersebut asalkan ada informasi yang benar. Di pihak lain, ada pula masyarakat pengusaha yang memang tidak mau melakukan pinjaman walaupun sebenarnya pengusaha sangat membutuhkan tambahan modal.
- 3) Kurangnya peningkatan sumberdaya manusia. Dalam kaitannya dengan kualitas sumberdaya manusia, khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah telah menjadi salah satu penyebab kurangnya peran perempuan dalam pembangunan. Murniati dkk. (2001) mengetengahkan bahwa faktor budaya menjadi salah satu kendala kurangnya pendidikan bagi perempuan, tapi di satu pihak diungkapkan bahwa perempuan juga mendapatkan pendidikan di luar sekolah yang tidak tercatat dan justru banyak diperoleh perempuan dari keluarga dan masyarakat.
- 4) Kurangnya penataan kelembagaan dan jaringan. nampaknya pelaku usaha di Kelurahan Jampangkulon menunjukkan kurangnya koordinasi atau tidak adanya pengembangan informasi dan jaringan di antara kelompok-kelompok usaha atau

organisasi yang dibentuk oleh pemerintah melalui kegiatan sektoral mau pun kelompok-kelompok usaha masyarakat yang tumbuh dari bawah, sehingga perlu dilakukan advokasi, pendampingan ataupun fasilitasi terhadap penataan kelambagaan dan jaringan. Organisasi yang berkecimpung langsung dalam kegiatan ekonomi belum sepenuhnya dapat melakukan koordinasi dengan anggota-anggota di dalam satu kelurahan maupun pihak luar.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah implementasi kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kelurahan Jampang kulon?.
- 2) Bagaimanakah produktivitas usaha perekonomian masyarakat di Kelurahan Jampangkulon?.
- 3) Bagaimanakah pengaruh implementasi kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap produktivitas usaha ekonomi masyarakat Kelurahan Jampang kulon?

## **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui implementasi kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kelurahan Jampangkulon.
- 2) Mengetahui produktivitas usaha perekonomian masyarakat di Kelurahan Jampangkulon.
- 3) Mengetahui pengaruh implementasi kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap produktivitas usaha ekonomi masyarakat Kelurahan Jampang kulon.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi:

- 1) Lurah Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pentingnya implementasi kebijakan perubahan

status desa menjadi kelurahan untuk meningkatkan produktivitas usaha perekonomian masyarakat.

- 2) Masyarakat pelaku usaha membantu pengembangan usaha perekonomian masyarakat di tingkat kelurahan.

## 2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

### 2.1. Pengertian Kebijakan Publik

Rahmawati (2013: 262) mengatakan bahwa kata kebijakan berasal dari kata “bijak” yang dapat berarti *learned*, *prudent*, *experienced*. Kata bijak merupakan kata sifat yang selanjutnya dengan awal “ke” dan akhiran “an” menjadi kata benda “kebijakan”. Dengan demikian kata kebijakan berarti menunjukkan adanya kemampuan atau kualitas yang dimiliki seseorang dalam keadaan yang *learned* (dipelajari), *prudent* atau baik dan *experienced* (pengalaman). Azza (2021: 363) menambahkan bahwa kebijakan merupakan sebuah putusan yang dibuat untuk sebuah lembaga atau aparatur negara yang bertanggung jawab baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif kebijakan di buat karena melaksanakan tujuan negara tersebut.

Kebijakan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap penyelenggaraan pemerintahan dari pemerintahan tingkat desa sampai tingkat pusat. Rakhmat dan Firdaus (2019: 35) menguraikan bahwa kebijakan publik secara normatif adalah implementasi dari serangkaian tahapan dan tingkatan proses pencapaian hasil (*output*) program-program kebijakan negara. Selanjutnya dikemukakan bahwa keadilan social dan kebijakan publik merupakan dua hal pokok yang saling berkaitan. Hadirnya kebijakan public dapat berimplikasi pada terwujudnya keadilan di masyarakat.

Tachjan dalam Yogia dan Suri (2020: 249) menjelaskan tentang tujuan kebijakan publik adalah diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan *public goods* (barang publik) maupun *public service* (jasa publik). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik.

Sirajuddin (2014: 3) mengemukakan bahwa berdasarkan beberapa pendefinisian oleh para ahli, dapat dirumuskan bahwa: (1) kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administratur negara atau administratur publik, dengan demikian kebijakan publik

adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah, (2) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang per orang atau Zolongan. Kebijakan publik mengatur semua domain lembaga administratur publik, dan (3) dikatakan atau disebut sebagai kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya..

Lebih lanjut Sirajuddin (2014: 3) menambahkan bahwa selain rumusan di atas, dapat pula disimpulkan bahwa kajian kebijakan publik merupakan studi yang kompleks, karena pelaksanaan suatu kebijakan public harus melalui sejumlah tahapan, yaitu: (1) pengindentifikasian dan merumuskan masalah publik, (2) perumusan dan pengagendaan suatu kebijakan, (3) penganalisaan suatu kebijakan, (4) pembuatan keputusan terhadap suatu kebijakan, (5) pengimplemen-tasian dan pemonitoring suatu kebijakan, (6) pengevaluasian suatu kebijakan, apakah telah mencapai hasil sebagaimana disainya, serta (7) pengkajian dampak dan efektifivitas pelaksanaan suatu kebijakan

## 2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Ayutasya, dkk (2020: 2) mengatakan bahwa implementasi akan selalu dikaitkan dengan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku untuk masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan. implementasi akan selalu dikaitkan dengan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku untuk masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan.

Alamsyah, dkk. (2021: 110) mengatakan bahwa proses implementasi suatu kebijakan merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejewantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Yulianti (2019: 13) mengatakan bahwa implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat

pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Implementasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Sementara itu Horton dan Hunt dalam Praja (2020: 1) menambahkan bahwa implementasi suatu program atau kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam porses kebijakan. Agustino dalam Hayati (2021: 15) mengungkapkan bahwa implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan dalam prakteknya. Implementasi adalah sebuah tindakan atau proses gagasan yang sudah di susun dengan begitu cermat dan detail menuju tujuan kebijakan melalui langkah langkah administratif serta politik.

Jones dalam Ayutasya, dkk (2020: 3) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu

- 1) Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan,
- 2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
- 3) Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Lebih lanjut Ayutasya, dkk (2020: 3) mengatakan bahwa sebagai pegangan bagi para implementor kebijakan, harus disadari bahwa implementasi kebijakan itu merupakan hal yang paling berat, karena dalam tataran inilah masalah-masalah yang kadang tidak ditemui dalam perumusan kebijakan, akan muncul dilapangan disaat kebijakan itu diimplementasikan. Oleh karena itulah, apakah kebijakan itu dalam tataran implementasi telah diorganisir dengan baik, juga telah dijabarkan produk kebijakan itu ke hal-hal yang lebih operasional, ataukah juga telah siap dan mudah diaplikasikan untuk mencapai tujuan kebijakan yang dikehendaki bersama.

Sedangkan Smith dalam Harun Haras (2019: 44-45) mengatakan bahwa dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan, keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri melainkan merupakan satu kesatuan yang saling memengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik. Keempat variabel dalam implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu antara lain:

- 1) Program (kebijakan) yang dilaksanakan.
- 2) *Target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
- 3) Unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Faktor lingkungan, unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik

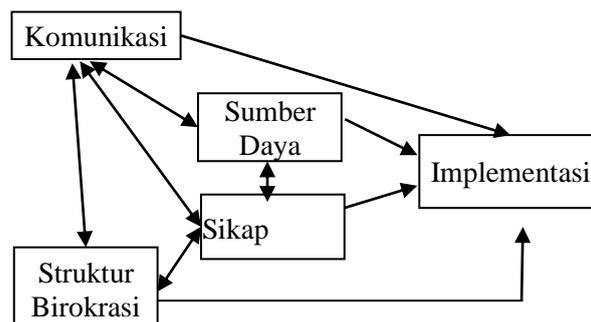
### 2.3. Model Implementasi Kebijakan

Sirajuddin (2014: 4) mengatakan bahwa pendekatan kontijensi atau situasional dalam implementasi kebijakan yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adaptabilitas banyak didukung oleh implementasi kebijakan tersebut. Mengimplementasikan suatu kebijakan public dapat dilakukan dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan diimplementasikan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari suatu kebijakan publik.

Lebih lanjut Sirajuddin (2014: 4) menambahkan bahwa beberapa ahli memperkenalkan model implementasi kebijakan publik, yaitu: (1) Model diperkenalkan Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975), (2) Model yang diperkenalkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983). (3) Model Brian W Hoogwood dan Lewis A. Gun (1978). (4) model Grindle (1980). (5) model yang disusun oleh Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny Hjern dan David O'porter (1981). (6) Model George C Edward III (1980).

Menurut George C. Edward III dalam Indiahono (2009: 31-33) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: (1) faktor sumberdaya, (2) komunikasi, (3), disposisi, dan (4) struktur organisasi, dan keempat variabel tersebut

saling berhubungan satu sama lain sebagaimana dapat digambarkan berikut ini:



Sumber: Indiahono, 2009: 31-33)

Gambar 2.1

### Model Implementasi Kebijakan Menurut George. C. Edward III

Penjelasan mengenai ke-empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edward III adalah sebagai berikut (Agustino, 2008: 156):

#### 1) Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

#### 2) Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan?”. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik, yang juga dari komunikasi tersebut membentuk kualitas partisipatif masyarakat.

### 3) Faktor Disposisi (Sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

### 4) Faktor Struktur Organisasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melaksanakannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena terdapat ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

## 2.4. Pengertian Perekonomian Masyarakat

Manusia hidup secara berkelompok dan dalam keadaan dinamis, sehingga sifat manusia selalu berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, nampaknya kata "masyarakat" tidak memiliki definisi yang tunggal. Persepsi para pakar tentang masyarakat juga berbeda satu dengan yang lainnya. Berikut ini pengertian masyarakat dari para pakar sosiologi (Setiadi dan Kollip, 2010: 35-36):

- 1) Emil Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.
- 2) Karl Marx melihat masyarakat sebagai struktur yang terdapat ketegangan sebagai akibat pertentangan antar kelas sosial sebagai akibat pembagian nilai-nilai ekonomi yang tidak merata di dalamnya.
- 3) M.J. Herskovits mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti suatu cara hidup tertentu.
- 4) J.L. Gillin dan J.P. Gillin memberikan batasan masyarakat sebagai kelompok yang tersebar dengan perasaan persatuan yang sama.

- 5) Max Weber mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.
- 6) Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
- 7) Paul B. Horton mengartikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama cukup lama, mendiami wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok tersebut.

Terlepas dari berbagai pandangan yang berbeda tentang masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli, Setiadi dan Kollip (2010: 35-360) menemukan titik temu yaitu masyarakat sebagai kumpulan manusia yang terdiri dari komponen-komponen berikut:

- 1) Terdapat sejumlah orang yang jumlahnya relatif besar, saling berinteraksi antara satu dan lainnya baik antar individu, individu dan kelompok, maupun antar kelompok dalam satu kesatuan sosial yang menghasilkan produk kehidupan, yaitu kebudayaan.
- 2) Menjadi struktur dan sistem sosial budaya, baik dalam skala kecil (mikro) maupun dalam skala besar/ luas (makro) antar kelompok.
- 3) Menempati kawasan tertentu dan hidup di dalam kawasan tersebut dalam waktu yang relatif lama hingga antar generasi.

Dengan demikian secara sederhana perekonomian masyarakat dapat diartikan sebagai perekonomian yang diselenggarakan oleh sekelompok manusia yang hidup bersama secara kelompok yang saling berinteraksi dan mendiami wilayah tertentu. Gunawan (1999: 6) menyatakan bahwa perekonomian yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.

## 2.5. Produktivitas Usaha Perekonomian Masyarakat

Beberapa ahli memberi pengertian yang sedikit berbeda. E. Sutrisno (2009: 99) berpendapat bahwa produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif. Suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masukan. Masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dengan kesatuan fisik, bentuk dan nilai. Sedangkan

produktivitas dalam bidang industri mempunyai arti ukuran yang relatif nilai atau ukuran yang ditampilkan oleh daya produksi, yaitu sebagai campuran dari produksi dan aktivitas.

Sementara itu, Maryanti, Sri., dkk. (2021: 23) mengatakan bahwa produktivitas merupakan perbandingan output dan input dalam suatu proses produksi. Manajemen, sumber daya manusia, biaya produksi, peralatan dan sewa waktu merupakan komponen dari input, sedangkan output terdiri dari produksi, produk yang dijual, pendapatan, pangsa pasar, dan kerusakan dari produk. Pasaribu (2020: 296) menambahkan bahwa produktivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Sedangkan Webster (dalam E. Sutrisno, 2011: 99) memberikan batasan tentang produktivitas, yaitu:

- 1) Keseluruhan fisik dibagi unit dari usaha produksi.
- 2) Tingkat keefektifan dari manajer industri di dalam penggunaan aktivitas untuk produksi
- 3) Keefektifan dalam menggunakan tenaga kerja dan peralatan

Sedangkan dalam teori ekonomi, kata produktivitas merujuk pada pengertian suatu kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa (Firmansyah, Fernando, dan Awaludin, 2011: 42). Selanjutnya Firmansyah, Fernando, dan Awaludin (2011: 43) membagi unsur-unsur produksi menjadi 3 (tiga) yaitu input produksi, proses produksi, dan output produksi. Input produksi adalah segala sesuatu yang akan diolah, proses produksi merupakan kegiatan yang mengubah atau mengolah input menjadi output, dan output produksi merupakan hasil dari proses pengolahan produksi.

Dalam teori ekonomi, faktor-faktor produktivitas diartikan sebagai unsur-unsur yang digunakan dalam proses produksi, yang meliputi sumber daya alam, tenaga kerja manusia, sumber daya modal, dan sumber daya keahlian (Firmansyah, Fernando, dan Awaludin, 2011: 44). Selanjutnya Firmansyah, Fernando, dan Awaludin (2011: 44-46) menjelaskan bahwa:

- 1). Sumberdaya alam, merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh alam guna memenuhi kebutuhan. Dalam menggali dan memanfaatkan sumberdaya alam, manusia harus mampu memelihara dan mengembangkannya agar sumber daya alam

tersebut tidak cepat rusak dan habis.

- 2). Sumberdaya manusia, merupakan semua kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dipakai dalam proses produksi. Tenaga kerja manusia berdasarkan kualitasnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. Tenaga kerja terdidik (*skilled labour*) adalah tenaga kerja yang memperoleh pendidikan, baik formal, maupun nonformal.
  - b. Tenaga kerja terlatih (*trained labour*) adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian berdasarkan pelatihan dan pengalaman.
  - c. Tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih (*unskilled and untrained labour*) adalah tenaga kerja yang mengandalkan kekuatan jasmani semata.

Sementara itu, Mulyani, Mahfudz, dan Permana (2009: 15) menambahkan bahwa sumberdaya manusia yang berkualitas harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik dapat mendasari segala tingkah laku manusia untuk senantiasa melakukan yang terbaik, jujur, adil, serta berusaha untuk tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Sehingga keberdaannya akan selalu berguna dan tidak sia-sia.
  - b. Keahlian. Manusia yang memiliki keahlian akan dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan baik dalam segi waktu maupun kualitas. Jadi manusia yang mempunyai keahlian akan sangat berguna untuk dapat menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas.
  - c. Kekuatan fisik. Kekuatan fisik manusia akan sangat berguna jika diarahkan pada hal-hal yang positif.
- 3). Sumberdaya modal, merupakan barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk selanjutnya. Faktor produksi modal dapat dikategorikan sebagai berikut:
    - a. Bentuk modal
      - Modal nyata (modal konkret) adalah modal yang dapat dilihat secara konkret dalam proses produksi.

- Modal tidak nyata (modal abstrak) adalah modal yang dapat dilihat, tetapi memiliki nilai dalam perusahaan, seperti nama baik perusahaan (*goodwill*) dan merek produk.

b. Manfaat dalam Proses Produksi

- Modal tetap adalah barang-barang modal yang dapat digunakan berkali-kali dalam proses produksi.
- Modal lancar adalah barang-barang modal yang habis sekali pakai dalam proses produksi.

Sedangkan menurut Mulyani, Mahfudz, dan Permana (2009: 16), sumberdaya modal dikategorikan menjadi:

a. Modal menurut pemiliknya

- Modal perseorangan, artinya modal tersebut dimiliki oleh perseorangan.
- Modal masyarakat, artinya modal tersebut dimiliki oleh banyak orang dan untuk kepentingan orang banyak.

b. Modal menurut wujudnya

- Konkret, artinya modal yang jelas wujudnya tetapi dapat dilihat.
- Abstrak, artinya modal yang tidak terlihat tetapi kegunaannya dapat dirasakan.

c. Modal menurut bentuknya.

- Uang, artinya modal berupa dana
- Barang, artinya modal berupa alat yang digunakan dalam proses produksi.

d. Modal menurut sifatnya

- Modal tetap, artinya modal yang dapat digunakan lebih dari satu kali masa produksi.
- Modal lancar, artinya modal yang habis dalam satu kali masa produksi.

e. Modal menurut sumbernya

- Modal sendiri, artinya modal yang berasal dari pemilik perusahaan
- Modal pinjaman, artinya modal pinjaman dari pihak lain.

4). Sumberdaya Keahlian atau Kewirausahaan, adalah faktor produksi yang mengatur dan mengombinasikan faktor-faktor produksi secara efektif dan efisien.

Suatu produk bergantung pada proses produksi yang dilakukannya. Sementara itu,

proses produksi bergantung juga pada faktor-faktor produksi yang digunakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai produk yang dihasilkan sangat bergantung pada nilai faktor produksi yang dikeluarkan dalam proses produksi. Firmansyah, Fernando, dan Awaludin (2011: 47) menyatakan bahwa hubungan saling ketergantungan antara produk (output) dan faktor produksi dalam proses produksi dalam teori ekonomi dikenal sebagai fungsi produksi. Secara matematis, hubungan antara faktor produksi (*input*) dan hasil produksi (*output*) dituliskan sebagai berikut:

$$Q = f(K, L, R, T)$$

Keterangan:

Q = Jumlah produk yang dihasilkan (*Quantity*)

f = fungsi produksi

K = Modal (*Capital*)

L = Tenaga Kerja (*Labour*)

T = Teknologi (*Technology*)

Model matematik tersebut mengandung arti barang dan jasa yang dihasilkan (Q) bergantung dari masukan sumber daya produksi (K, L, R, T) yang diproses. Jika salah satu sumber daya masukan diubah, keluaran (*output*) akan ikut berubah. Oleh karena itu, semua faktor sumberdaya produksi tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil produksi.

## 2.6. Kerangka Pemikiran

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan kebijakan atau upaya pemerintah dalam rangka membentuk kelurahan baru dengan tujuan tercapainya efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Posisi dan letak Desa Jampangkulon yang strategis, mengundang banyak masyarakat pendatang. Hal ini menyebabkan semakin heterogennya masyarakat desa. Dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai serta potensi ekonomi yang ada dapat memberikan sebuah jaminan dan dukungan bagi pemerintah daerah untuk dapat

melaksanakan perubahan status desa menjadi Kelurahan Jampangkulon. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan menuntut adanya perubahan perangkat, perangkat desa menjadi perangkat kelurahan. Hal ini dikarenakan kedua sistem pemerintahan ini, walaupun setara tetapi komponen-komponen yang ada dalam birokrasinya berbeda.

Dengan demikian nampaknya perubahan status desa menjadi Kelurahan Jampangkulon akan berdampak positif terhadap kehidupan masyarakatnya, antara lain:

- 1) Perubahan status desa menjadi kelurahan berguna untuk mempercepat laju pembangunan desa.
- 2) Penggalan potensi desa yang diubah statusnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan semakin besar demi kemajuan desa itu sendiri.
- 3) Penyebaran penduduk serta taraf kehidupan masyarakat desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan cenderung membaik.

Berdasarkan uraian di atas, maka nampaklah jelas bahwa perubahan status desa menjadi Kelurahan Jampangkulon akan memberikan pengaruh terhadap produktivitas usaha perekonomian masyarakat Kelurahan Jampangkulon.

### **3. Objek dan Metode Penelitian**

#### **3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif korelasional, yaitu pendekatan yang memungkinkan dilakukan pencatatan dan analisis data hasil penelitian secara eksak dan menganalisis datanya menggunakan perhitungan statistik. Sementara itu, Sugiyono (2017: 2) mendefinisikan metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

#### **3.2 Operasionalisasi Variabel**

Operasionalisasi variabel merupakan tahap yang penting dalam proses penelitian. Silalahi (2010: 117) mendefinisikan variabel sebagai konstruk atau konsep yang memiliki variasi nilai. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu:

Variabel bebas (X) : Implementasi Kebijakan

Variabel terikat (Y) : Produktivitas Usaha Perekonomian Masyarakat

Berdasarkan tinjauan teoritis di atas, dapatlah dikemukakan definisi variabel penelitian sebagai berikut:

- 1). Implementasi kebijakan (X) adalah implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi sebagai upaya meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan dimensi: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.
- 2). Produktivitas Usaha Perekonomian Masyarakat (Y) adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa yang diselenggarakan oleh masyarakat dan berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri, dengan dimensi: (1). sumberdaya alam, (2). sumberdaya manusia, (3). sumberdaya modal, dan (4). sumberdaya keahlian dan kewirausahaan.

### 3.3 Populasi dan Sampel

Sugiyono (2017: 215) mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya., sedangkan sampel penelitian adalah sebagian dari populasi itu. Sedangkan Usman dan Akbar (2009: 42-43) menambahkan bahwa populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas, sedangkan sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kelurahan Jampangkulon yang menjadi pelaku usaha ekonomi yang berjumlah 782 orang yang terdiri dari Bidang Pertanian/ Peternakan sebanyak 385 orang, Bidang Perdagangan sebanyak 226, Pegawai Swasta sebanyak 59 orang, Industri sebanyak 28 orang, dan Jasa sebanyak 84 orang..

Riduwan dan Akdon (2005: 245) mengatakan bahwa dengan ukuran populasi lebih dari 30 orang maka sampling jenuh (sensus) tidak dapat dilakukan. Berkaitan dengan penentuan besarnya sampel (*sample size*), Arikunto (2010: 178) menyatakan bahwa agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik maka diperlukan sampel yang betul-betul mencerminkan populasi, sehingga penentuan jumlah sampel dengan persentase kini sudah harus ditinggalkan. Oleh karena itu, penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini digunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N.e^2 + 1}$$

dimana:

- n = Jumlah anggota sampel yang diambil
- N = Jumlah anggota populasi
- e = Presisi (ditetapkan 10%)

sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak:

$$n = \frac{782}{(782)(0.1)^2 + 1} = \frac{782}{7,82 + 1} = 88,66 \approx 89$$

yang diambil dengan cara *random sampling* dimana anggota sampel diambil secara acak oleh peneliti.

### 3.4. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik parametrik jika asumsi-asumsi statistiknya terpenuhi. Apabila asumsinya tidak terpenuhi, maka data akan dianalisis dengan teknik bebas distribusi atau non-parametrik. Teknik statistik parametrik menggunakan data interval dan rasio dengan persyaratan antara lain data dipilih secara acak (*random*), datanya berdistribusi normal, data yang dihubungkan berpola linear, dan data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sesuai dengan subyek yang sama. Kalau salah satu persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka analisis parametrik tidak dapat dilakukan. Uji asumsi yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain Uji Normalitas Data dan Uji Linearitas Data.

Adapun teknik analisis statistik yang digunakan 2 teknik yaitu teknik analisis

deskriptif persentase (DP) dan analisis statistik inferensial. Analisis Statistik Deskriptif dimaksudkan untuk melihat gambaran umum karakteristik sumber data penelitian dilakukan pengelompokan data ke dalam dua kelompok yaitu kelompok data implementasi kebijakan dan kelompok data produktivitas usaha perekonomian masyarakat. Skor masing-masing item dan variabel penelitian dilakukan dengan menggunakan rata-rata skor dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata skor} = \frac{\sum FN}{n}$$

dimana:

n = jumlah responden

$\sum FN$  = jumlah hasil kali antara frekuensi (F) dengan bobot pilihan (N).

Sedangkan analisis statistik inferensial yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear tunggal, yaitu teknik analisis yang dipergunakan untuk memprediksi perubahan nilai Y atas X. Sedangkan untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan antar variabel yang dianalisis dilakukan dengan analisis korelasi *Pearson Product Moment* (PPM).

Selanjutnya, Sugiyono (2010: 231) menyatakan bahwa “untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antar variabel yang diteliti digunakan statistik uji-t”, sebagai berikut:

$$t_{hitung} = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

dimana:

$t_{hitung}$  = nilai  $t_{hitung}$

r = nilai koefisien korelasi

n = banyaknya sampel

kemudian nilai  $t_{hitung}$  tersebut dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 5%, dengan kaidah pengujian sebagai berikut:

Jika  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ , maka terdapat hubungan antara variabel yang diteliti

Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka tidak terdapat hubungan antara variabel yang diteliti.

Adapun untuk menyatakan persentase besar kecilnya sumbangan variabel implementasi kebijakan (X) terhadap produktivitas usaha perekonomian masyarakat (Y) dapat ditentukan dengan rumus Koefisien Penentu (KP) atau disebut juga Koefisien

Determinasi (KD) dengan rumus:  $KD = r^2 \times 100\%$

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis deskriptif masing-masing variabel diperoleh hasil sebagai berikut:

*Pertama*, implementasi kebijakan perubahan status desa menjadi kecamatan dalam katagori baik. Berdasarkan perhitungan rata-rata skor terhadap variabel Implementasi kebijakan perubahan status desa menjadi kecamatan (X) diperoleh rata-rata sebesar 3,47 atau  $\frac{3,47}{5} \times 100\% = 69,40\%$  dari nilai idealnya dan termasuk dalam kategori baik. Hasil ini memberikan indikasi bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan perubahan status desa menjadi kecamatan di Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi benar-benar telah dipersiapkan secara baik. Jika merujuk pada Model Implementasi menurut G. C. Edward III (dalam Indiahono, 2009: 31-33) maka tidak berlebihan bila dikatakan bahwa faktor sumberdaya, komunikasi, disposisi, dan struktur organisasi yang ada di pemerintahan Kelurahan Jampangkulon telah berjalan secara baik.

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Berkaitan dengan faktor ini, nampaknya Kelurahan Jampangkulon didukung oleh aparat kelurahan (staf) yang kompeten dibidangnya, kejelasan informasi tentang implementasi kebijakan perubahan status, *aparat kelurahan memiliki* otoritas atau legitimasi dalam melaksanakan kebijakan, serta didukung oleh sejumlah fasilitas fisik yang juga memadai.

*Kedua*, produktivitas usaha perekonomian masyarakat termasuk dalam katagori baik. Berdasarkan perhitungan rata-rata skor pada produktivitas usaha perekonomian masyarakat (Y) diperoleh rata-rata sebesar 3,65 atau  $\frac{3,65}{5} \times 100\% = 73,00\%$  dari nilai idealnya dan termasuk dalam kategori baik. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa usaha perekomian masyarakat di Kelurahan Jampangkulon telah berkembang cukup baik.

Dalam teori ekonomi, seperti yang dikatakan oleh Firmansyah, Fernando, dan Awaludin (2011: 44) bahwa faktor-faktor produktivitas diartikan sebagai unsur-unsur yang digunakan dalam proses produksi, yang meliputi sumber daya alam, tenaga kerja manusia, sumber daya modal, dan sumber daya keahlian. Dengan hasil di atas dapatlah dikatakan bahwa:

- 1). Sumberdaya alam yang merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh alam guna memenuhi kebutuhan khususnya dalam usaha perekonomian masyarakat di Kelurahan Jampangkulon telah tersedia dan terpeliharaan dengan baik.
- 2). Sumberdaya manusia yang merupakan semua kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dipakai dalam proses produksi yang meliputi tenaga kerja terdidik (*skilled labour*), tenaga kerja terlatih (*trained labour*), dan tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih (*unskilled and untrained labour*) tersedia secara memadai.
- 3). Sumberdaya modal yang merupakan barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk selanjutnya bukan menjadi kendala bagi masyarakat Kelurahan Jampangkulon dalam mengembangkan usaha perekominnya.
- 4). Sumberdaya Keahlian atau Kewirausahaan merupakan faktor produksi yang mengatur dan mengombinasikan faktor-faktor produksi secara efektif dan efisien juga telah berjalan secara baik.

*Ketiga*, implementasi kebijakan perubahan status desa menjadi kecamatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas usaha perekonomian masyarakat. Berdasarkan analisis statistik inferensial disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perubahan status desa menjadi kecamatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas usaha perekonomian masyarakat di Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, dengan model persamaan regresi linear yang didapatkan adalah  $Y = 23,993 + 0,483X$ . Model persamaan regresi linear tersebut dapat diartikan bahwa konstanta sebesar 23,993 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan (karena positif) nilai dari variabel implementasi kebijakan perubahan status desa menjadi kecamatan (X), maka besarnya produktivitas usaha perekonomian masyarakat (Y) sebesar 23,993. Koefisien regresi sebesar 0,483 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena bernilai positif) satu satuan nilai implementasi

kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan (X) akan memberikan peningkatan nilai produktivitas usaha perekonomian masyarakat (Y) sebesar 0,483.

Implementasi kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan kebijakan atau upaya pemerintah dalam rangka membentuk kelurahan baru dengan tujuan tercapainya efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kemampuan kelurahan dalam mengolah berbagai sumberdaya yang ada untuk tujuan pembangunan ekonomi masyarakat.

Posisi dan letak Desa Jampangkulon yang strategis, mengundang banyak masyarakat pendatang. Hal ini menyebabkan semakin heterogennya masyarakat desa. Dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai serta potensi ekonomi yang ada dapat memberikan sebuah jaminan dan dukungan bagi pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan perubahan status desa menjadi Kelurahan Jampangkulon. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan menuntut adanya perubahan perangkat, perangkat desa menjadi perangkat kelurahan. Hal ini dikarenakan kedua sistem pemerintahan ini, walaupun setara tetapi komponen-komponen yang ada dalam birokrasinya berbeda.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa secara signifikan implementasi perubahan status desa menjadi Kelurahan Jampangkulon berdampak positif terhadap produktivitas usaha perekonomian masyarakatnya. Dengan kata lain, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi berdampak pada hal-hal berikut:

- 1) Perubahan status desa menjadi kelurahan berguna untuk mempercepat laju pembangunan desa.

- 2) Penggalian potensi desa yang diubah statusnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan semakin besar demi kemajuan desa itu sendiri.
- 3) Penyebaran penduduk serta taraf kehidupan masyarakat desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan cenderung membaik.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

*Pertama*, besarnya rata-rata skor responden variabel implementasi kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kelurahan Jampangkulon sebesar 3,47 atau sebesar 69,40% dari nilai idealnya dan termasuk dalam katagori baik.

*Kedua*, besarnya rata-rata skor responden variabel produktivitas usaha perekonomian masyarakat di Kelurahan Jampangkulon sebesar 3,65 atau sebesar 73,00% dari nilai idealnya dan termasuk dalam katagori baik.

*Keiga*, terdapat pengaruh positif dan signifikan implementasi kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap produktivitas usaha perekonomian masyarakat di Kelurahan Jampangkulon dengan nilai:

- 1).  $r_{XY} = 0,428$  yang berarti tingkat hubungan antara variabel implementasi kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan (X) dengan produktivitas usaha perekonomian masyarakat (Y) di Kelurahan Jampangkulon termasuk dalam kategori cukup kuat.
- 2).  $KD = 0,1832$  yang berarti 18,32% nilai variabel produktivitas usaha perekonomian masyarakat (Y) di Kelurahan Jampangkulon dapat dijelaskan oleh nilai implementasi kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan (X) dan 81,68% ditentukan oleh faktor lain.
- 3).  $t_{hitung} = 4,483 > t_{tabel} = 1,988$  yang berarti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel implementasi kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan (X) terhadap variabel produktivitas usaha perekonomian masyarakat (Y).
- 4). Model persamaan regresi linear  $Y = 23,993 + 0,483X$  yang berarti konstanta sebesar 23,993 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan (karena positif) nilai dari variabel

implementasi kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan (X), maka besarnya produktivitas usaha perekonomian masyarakat (Y) di Kelurahan Jampangkulon sebesar 23,993. Koefisien regresi sebesar 0,483 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena bernilai positif) satu satuan nilai implementasi kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan (X) akan memberikan peningkatan nilai produktivitas usaha perekonomian masyarakat (Y) sebesar 0,483..

Berdasarkan simpulan di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

*Pertama*, Pemerintahan Kelurahan Jampangkulon sebaiknya berusaha secara nyata untuk meningkatkan pemahaman dalam implementasi perubahan status desa menjadi kelurahan. Berbagai upaya yang dapat ditempuh dalam peningkatan implementasi penganggaran berbasis kinerja antara lain:

- 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya perubahan status desa menjadi kelurahan melalui sosialisasi dalam setiap waktu dan kesempatan.
- 2) Meningkatkan pemahaman perangkat kelurahan tentang tujuan perubahan status desa menjadi kelurahan sehingga program, dan berbagai kegiatan dalam pelayanan masyarakat benar-benar berorientasi pada pencapaian tujuan.

*Kedua*, Pemerintah Kelurahan Jampangkulon sebaiknya berusaha secara nyata untuk meningkatkan potensi usaha perekonomian masyarakat melalui:

- 1) Perbaiki infrastruktur sarana dan sarana transportasi, sarana perdagangan, dan program-program yang berorientasi pada usaha ekonomi kerakyatan.
- 2) Membuka akses yang memungkinkan masyarakat kecil mampu mendapatkan pinjaman dana dengan jasa rendah atau bahkan tanpa jasa sehingga masyarakat kecil memiliki modal usaha.
- 3) Pembinaan ketrampilan dan keahlian masyarakat melalui berbagai diklat usaha bisnis ekonomi, maupun usaha ekonomi mikro masyarakat.

#### **Daftar Pustaka**

- Agustino, Leo. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alamsyah, dkk. (2021) Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Bekasi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*. Volume 12,

Nomor 2, Juni 2021

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ayutasya, P.I, Purwanti, D., dan Amirulloh, M. R (2020). Implementasi Aplikasi Pendaftaran Antrian Permohonan Paspor Online. *Jurnal Administrasai Publik Untirta*, Vol. 11 No. 01 Tahun 2020
- Azza N., dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal JRPP*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021  
Bandung: Alfabeta
- Firmansyah, H., Fernando, R., dan Awaludin, A. (2011). *Economics 1*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Gunawan, S. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Harun, Nur Istiyan., dan Haras, Khairul T. (2019). Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Journal of Public Acministration Studies Volume 2, Nomor 1, April 2019*.
- Hayati, Ani. (2021). Implementasi Kebijakan Mengurangi Pengangguran Perkotaan Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau. *PAsira*, Vol.4 No.1, 26 February 2021.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media
- Maryanti, Sri., dkk. (2021). Meningkatkan Produktivitas Masyarakat Akibat Dampak Pandemi Covid-19 Melalui Penyaluran Bantuan Berupa Bibit Itik Kepada Pengusaha Pemula Di Desa Darek. *Jurnal Ilmiah Hospitality. Vol.10 No.1 Juni 2021*
- Mulyani, S.N., Mahfudz, A., dan Permana, L. (2009). *Ekonomi: Untuk Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah Kelas X*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Pasaribu, Veta Lidya Delimah., dkk. (2020). Meningkatkan Produktivitas Usaha Dimasa Pandemi Pada Ibu PKK Rt 004 / 003 Kelurahan Sawah Baru Ciputat, Tangerang Selatan. *Abdi Laksana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2 Nomor 2*.
- Pasaribu, Veta Lidya Delimah., dkk. (2020). Meningkatkan Produktivitas Usaha Dimasa Pandemi Pada Ibu PKK Rt 004 / 003 Kelurahan Sawah Baru Ciputat, Tangerang Selatan. *Abdi Laksana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2 Nomor 2*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan, Pemekaran dan Penghapusan Kelurahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan
- Praja, Dalem Tria Angga. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Mewujudkan Efektivitas Program Bantuan Pangan Non

- Tunai (BPNT) Di Kabupaten Garut. *Jurnal Publik*. Vol. 14; No. 02; 2020; 01-07
- Rahmawati, Yuyun. (2013). Implementasi E-Ktp Di Kecamatan Palaran Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2013, 1 (2): 561-574
- Rakhmat dan Firdaus (2019). Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* .Volume 1 Nomor 2 Edisi Maret 2019 ISSN: 2654-3141
- Riduwan, dan Akdon. (2005). *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Setiadi, E.M., dan Kolip, U. (2010). *Pengantar Sosiologi. Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Silalahi, Ulber. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sirajuddin, Ilham Arief. (2014: 3). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 4 No. 1 Thn. 2014
- Sugiyono. (2010). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Usman, Husaini., dan Akbar, Purnomo. S. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta Bumi Aksara
- Yogia, Moris Adidi dan Suri, Dia Meirina (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan (*Implementation Of Empowerment Policy Through Economic Recommendations Business Programs*). *Socio Konsepsia Vol. 9, No. 03, Mei – Agustus, Tahun 2020*
- Yulianti, Devi. (2019). Implementasi Program Kemitraan Dalam *Corporate Social Responsibility (CSR)* Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan. *Jurnal Sosiologi*, Vol. 20, No. 1: 11-21

**Correlations**

		X	Y
X	Pearson Correlation	1	.428**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	89	89
Y	Pearson Correlation	.428**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	89	89

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.428 <sup>a</sup>	.183	.174	5.700

a. Predictors: (Constant), X

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	633.400	1	633.400	19.494	.000 <sup>a</sup>
	Residual	2826.780	87	32.492		
	Total	3460.180	88			

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.993	5.352		4.483	.000
	X	.483	.109	.428	4.415	.000

a. Dependent Variable: Y